

VISI DAN MISI MADRASAH PEMBANGUNAN IAIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA¹

Oleh SUWITO²

I

Kebijakan pemerintah RI di bidang pembangunan sebagaimana tergambar dalam beberapa Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN tahun 1993 misalnya menyatakan bahwa titik berat dalam pembangunan jangka panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama mencapai keseimbangan antar bidang. Sedangkan pembangunan di luar bidang ekonomi dilaksanakan seirama dan serasi dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi. Jika dilihat pernyataan ini maka peranan pendidikan yang didambakan adalah untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Artinya, peranan pendidikan lebih diprioritaskan untuk mempersiapkan tenaga kerja guna menopang proses produksi dari pada untuk melaksanakan peranan pendidikan yang lain, seperti pemerataan pendapatan dan pengembangan disiplin sosial.

Selama pembangunan jangka panjang pertama, keberhasilan dalam pembangunan pendidikan antara lain dapat terlihat pada: perluasan pendidikan SD, kenaikan jumlah murid tingkat SLTP dan SLTA, meningkatnya jumlah pendidikan tinggi dan jumlah mahasiswa, dan meluasnya pendidikan non-formal. Akan tetapi di balik keberhasilan tersebut masih terdapat banyak permasalahan seperti: kualitas pendidikan masih rendah, ketimpangan pendidikan masih cukup tinggi, dan efisiensi pendidikan masih rendah. Kelemahan ini menyebabkan pendidikan belum sepenuhnya berperan dalam pemerataan pendapatan dan memerangi kemiskinan.

Perlu dicatat bahwa pesatnya perkembangan pendidikan di Indonesia cenderung mendorong pendidikan ke arah sistem pendidikan yang bersifat birokratis sentralistik. Berbagai kebijakan pendidikan yang ditetapkan pemerintah pusat cenderung “sabda pandita ratu” yang mesti harus dilaksanakan oleh daerah-daerah. Hal ini dapat ditunjukkan antara lain sejak kemestian memakai pakaian seragam sampai hal-hal yang menyangkut kurikulum. Sistem yang demikian cenderung menjadikan “keseragaman” sebagai tujuan. Hasil kebijakan yang demikian adalah manusia-manusia yang bermentalitas ‘juklak” dan “juknis” menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Akibat lebih jauhnya akan melahirkan manusia yang memiliki mentalitas yang selalu dalam bayang-bayang ketakutan dan kekhawatiran sehingga harus patuh dan tunduk pada perintah yang ada, betapapun anehnya perintah tersebut.

Kebijakan yang demikian dapat dimengerti karena pemerintah ketika itu cenderung berpendapat bahwa stabilitas nasional menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Stabilitas akan terwujud apabila pemerintah kuat dan mampu mengontrol kekuatan dan perkembangan yang ada di masyarakat.

Diakui bahwa pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang birokratis sentralistik tersebut membuahkan hasil antara lain pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pendapatan nasional meningkat, pembangunan berbagai sarana dan prasarana terlihat dan dapat dinikmati.

Pendidikan yang terlalu birokratis sentralistik di atas dapat menimbulkan dampak negatif bagi proses pendidikan itu sendiri dan bagi masyarakat umum. Dampak yang paling mencolok adalah berkembangnya mentalitas “jalan pintas” dalam dunia pendidikan. Selain itu, semakin lama semakin dirasakan bahwa

¹Bahan Diskusi pada Raker Guru dan Karyawan Madrasah Pembangunan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis, 5 Juli 2001. Diterbitkan dalam Buku “Menulis Gagasan Mempercepat Keberhasilan: Alih Status IAIN Menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2002), Penerbit Young Progressive Muslim (YPM) tahun 2019.

²Pembantu Rektor Bidang Akademik IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

praktek pendidikan cenderung memunculkan generasi terdidik yang bersifat materialistik. Hal ini sesungguhnya memang konsekuensi logis dari penerapan praktek pendidikan yang mementingkan ekonomi. Mentalitas “jalan pintas”, yakni semangat dan kemauan untuk bisa mendapatkan hasil secepat mungkin tanpa harus mengeluarkan pengorbanan yang setimpal, merupakan salah satu hasil dunia pendidikan dengan kondisi politik dan sosial Indonesia kini. Faktor lain yang mendorong munculnya watak materialistik dan jalan pintas tersebut adalah adanya tekanan kemiskinan, lebih-lebih tekanan adanya ketimpangan pendapatan.

Uraian di atas dapat dipahami bahwa pendidikan di Indonesia hingga kini masih diberlakukan sebagai lembaga yang mencetak “tenaga kerja”, dan bukan sebagai lembaga yang menghasilkan manusia utuh. Sekolah atau kuliah dijalani seseorang agar mendapatkan ijazah untuk bekerja. Proses sekolah/kuliahnya sendiri tidak pernah dinikmati, karena tidak penting. Mental demikian dapat menjadi faktor yang akan merusak kehidupan masyarakat.

Pada akhirnya diperlukan upaya untuk membuat kesadaran diri akan pentingnya pencapaian tujuan jangka panjang, memahami makna proses yang harus dilalui dan menyadari pentingnya nilai-nilai yang harus muncul dari diri sendiri. Setiap diri perlu berupaya untuk PD (percaya diri) dalam setiap kesempatan.

II

Pola hubungan antara pemerintah dan lembaga pendidikan dapat berakibat langsung terhadap pola hubungan antara lembaga pendidikan dan para murid, dan bahkan antara guru dan murid/mahasiswanya. Kalau pemerintah cenderung demokratis terhadap lembaga pendidikan, maka lembaga pendidikan dan para guru/dosen seharusnya bersifat demokratis pula terhadap anak didik. Sifat demokratis ini hanya dapat berlaku apabila pihak satu memposisikan pihak lain sebagai manusia dewasa.

Lembaga pendidikan diposisikan sebagai manusia dewasa apabila diberikan kelonggaran untuk mengembangkan kurikulum dan aturan akademik lain. Pemerintah hanya menetapkan kurikulum nasional dan aturan akademik lain yang sangat kecil, bersifat pokok-pokoknya saja dan memberi porsi yang sangat besar kepada lembaga pendidikan untuk menetapkan sendiri kurikulum lokal.

Seiring dengan hal tersebut, suasana demokratis hendaknya tercermin dalam seluruh proses belajar mengajar dan organisasi serta administrasi akademik kampus. Lembaga pendidikan seharusnya berupaya menawarkan sebanyak mungkin mata pelajaran/mata kuliah yang para siswa/mahasiswa diberi kelonggaran memilih. Jenis mata pelajaran/mata kuliah yang diwajibkan hendaknya tidak terlalu banyak agar memberi kesempatan kepada siswa/mahasiswa untuk membaca, menulis, dan/atau praktek materi yang sedang dialami. Para guru/dosen juga diberikan otonomi yang besar agar memiliki rasa tanggung jawab yang besar pula. Guru/dosen tidak harus bekerja dengan mendasarkan pada petunjuk teknis yang ditetapkan aparat, melainkan diberi kebebasan untuk berkreasi dalam rangka menjalankan tugasnya. Para fungsionaris dan karyawan lain di suatu lembaga pendidikan juga diberikan kebebasan untuk berkreasi dalam menunaikan tugas-tugasnya. Hasil kreasinya dihargai sebagai mestinya. Hak-haknya selalu dihargai dan merekapun berkewajiban menghargai hak-hak orang lain.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pendidikan yang demokratis menghendaki terciptanya praktek pendidikan yang lebih manusiawi karena memposisikan semua unsur tenaga kependidikan dan anak didiknya sebagai manusia yang patut dihargai kemanusiaannya.

III

Uraian di atas merupakan bahan kajian bagi sivitas akademika Madrasah Pembangunan untuk menatap masa depannya. Berdasarkan catatan, Madrasah Pembangunan IAIN Jakarta merupakan salah

satu hasil dari program pengabdian masyarakat mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta³ Ide dasar didirikannya sekolah ini adalah sebagai Laboratorium Fakultas Tarbiyah.

Hingga sekarang, tidak diperoleh kejelasan tentang posisi Madrasah Pembangunan ini bagi Fakultas Tarbiyah. Akan tetapi secara umum masyarakat menilai bahwa Madrasah Pembangunan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tergolong sekolah elit. Tidak diperoleh alasan mengenai posisi elit yang dimaksud. Bisa jadi karena tergolong biayanya mahal, administrasinya tertib, ketat disiplin murid dan guru-gurunya, atau hasil pengajarannya memperoleh ranking yang cukup tinggi dibanding madrasah lain. Semua itu, belum diperoleh dari hasil penelitian.

Sebagai Madrasah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sivitas akademika Madrasah Pembangunan juga perlu mengetahui beberapa kebijakan yang ditempuh oleh IAIN dalam rangka menghadapi era global.

Sejak tahun 1998 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah melakukan pengembangan dengan konsep "*IAIN with wider mandate*" (IAIN dengan mandat yang lebih luas). Dengan konsep ini, IAIN telah dan akan mengembangkan Jurusan/Program Studi bidang ilmu-ilmu eksakta dan ilmu-ilmu sosial, yang dalam tahap selanjutnya *di-upgrade* menjadi fakultas-fakultas. Di antara Program Studi yang sudah dibuka adalah Psikologi, Akuntansi, Manajemen, Teknik Informatika, dan Agribisnis. Pada awal 2001, Program Studi Psikologi telah dijadikan Fakultas. Selain itu, berkat kerjasama dengan Universitas Al-Azhar Masir telah pula didirikan Fakultas Dirasat Islamiyah. Khusus Program Studi Teknik Informatika dan Agribisnis, penyelenggaraannya bekerjasama dengan Institut Teknologi Bogor (IPB). Pembukaan Program Studi lain, baik bidang humaniora/keagamaan, sosial, dan eksakta sedang dalam persiapan.

Di antara alasan pengembangan IAIN menjadi Universitas karena sejak 1975 Madrasah Aliyah yang ada di Indonesia telah berubah orientasi, yang tadinya muatan mata pelajaran agama dan umum berbanding 70:30, menjadi 30:70. Sebagai akibat dari kebijakan ini, para lulusan Madrasah Aliyah mengalami perubahan orientasi untuk memilih Program Studi umum di Perguruan Tinggi.

Visi yang ditetapkan IAIN untuk menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) adalah menjadikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi terkemuka dalam mengintegrasikan keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan.

Adapun misinya meliputi:

1. Mencetak sarjana yang mampu bersaing dalam kehidupan global
2. Melakukan reintegrasi epistemologi keilmuan
3. Memberikan landasan moral terhadap pengembangan iptek
4. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian.
5. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sehubungan dengan visi dan misi di atas maka tujuan yang hendak diraih adalah:

1. Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi terkemuka yang mengintegrasikan keislaman, keilmuan, dan kemanusiaan.
2. Memberikan kesempatan bagi lulusan Madrasah Aliyah dan/atau Madrasah Aliyah Keagamaan termasuk Pesantren untuk melanjutkan ke perguruan tinggi secara linear.
3. Memberikan kesempatan bagi lulusan SLTA umum lainnya yang ingin memperdalam ilmu keagamaan tetapi tanpa kehilangan basis keilmuan sebelumnya.

³Lihat *Tiga Puluh Tahun IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1 Juni 1957- 1 Juni 1987, Lustrum VI*, h. 112.

Di antara kebijakan akademik yang akan ditempuh untuk mengintegrasikan keilmuan adalah: menetapkan setiap mata kuliah terdiri atas lima kandungan (*content*): 1) *Historical content*, 2) *Theoretical content*, 3) *Case content*, 4) *Practical content*, dan 5) *Islamic content* (bagi mata kuliah umum), dan *Social and Science Content* (untuk mata kuliah keagamaan).

Upaya konversi IAIN menjadi UIN tersebut telah mendapat respon positif dari Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional, walaupun beberapa persoalan teknis masih perlu memperoleh kesepakatan.

Sehubungan dengan informasi di atas, Madrasah Pembangunan sebagai salah satu produk IAIN Jakarta perlu juga mereposisi yang tadinya hanya diniatkan sebagai Laboratorium Fakultas Tarbiyah menjadi lebih diperluas lagi menjadi laboratorium UIN dari banyak Program Studi.

Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang ditetapkan oleh Madrasah Pembangunan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentunya harus sejalan dengan yang akan ditempuh oleh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang insya Allah dalam waktu dekat akan berubah menjadi universitas.

IV

Visi mengandung pengertian “apa yang dicita-citakan”, Misi mengandung uraian “bagaimana cara mencapai visi”, Sasaran berisi “profil kemampuan dan karakteristik lulusan yang dikehendaki” dan Tujuan berisi “hasil khusus yang diharapkan”.

Visi Madrasah Pembangunan haruslah dirumuskan secara konsisten dengan visi induknya yaitu IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jika visi IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berbunyi *menjadikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi terkemuka dalam mengintegrasikan keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan*, maka barangkali rumusan visi Madrasah Pembangunan adalah ***menjadikan Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai lembaga pendidikan dasar dan menengah terkemuka dalam memberikan dasar-dasar pengintegrasian keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan***.

Rumusan terhadap Misi, Sasaran dan Tujuan Madrasah Pembangunan tidak diberikan alternatif dalam tulisan ini, namun akan diberikan rambu-rambu untuk menilai apakah rumusan yang dijabarkan nanti bernilai sangat baik atau tidak.

Rumusan Misi dinilai sangat baik apabila sangat jelas dan lengkap mengemukakan upaya yang akan dilakukan untuk merealisasikan visi Madrasah Pembangunan.

Rumusan Sasaran dinilai sangat baik apabila sangat jelas diuraikan profil kemampuan lulusan dan kaitannya dengan visi dan misi Madrasah Pembangunan.

Rumusan Tujuan dinilai sangat baik apabila dirumuskan dengan sangat jelas dan lengkap tentang penguasaan pengetahuan dan pemahaman bidang ilmu, keterampilan khusus tertentu serta sikap akademik dan profesional lulusan yang akan dihasilkan.

Tentunya harus diingat bahwa masing-masing jenjang pendidikan perlu dirumuskan visi, misi, sasaran, dan tujuannya.